

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH,
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGAWASAN
FUNGSIONAL TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)

Oleh :

Joni Iskandar

Pembimbing : Vince Ratnawati dan Edfan Darlis

Faculty of Economics, Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail : joniiskandar544@rocketmail.com

*The Effect of Government Internal Control System, Human Resources
Competencies and Functional Control on Effectiveness of The
Financial Management Area
(Empirical Study in the SKPD's of Pekanbaru City)*

ABSTRACT

This study aimed to examine the influence of the government internal control System, the human resources competencies and functional control on the effectiveness of the financial management area. This study was conducted at SKPD of Pekanbaru city. The population in this study were employed who worked in the SKPD Pekanbaru city (32 government agencies). The sampling method used in this study is purposive sampling method. The respondent in this study is the head of SKPD, the head of financial, treasurer of SKPD and PPTK SKPD. The sample used in this study were 120 respondents. The hypotheses then tested is multiple linear regression analysis by using SPSS version 20.0. The result of this study indicated that the government internal control System, the human resources competencies and functional control has significantly effect on effectiveness of the financial management area. The magnitude of the effect (R^2) the government internal control System, the human resources competencies and functional control on the effectiveness of the financial management area was 48,5%. While the remaining 51,5% is influenced by other independent variabel that are not observed in this study.

Keywords : internal control, competencies, functional, effectiveness and government

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang ada pada suatu instansi harus ditata dengan sedemikian rupa agar pengelolaan keuangan daerah dapat

berjalan dengan efektif. Efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan di dalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan (Halim, 2004:74).

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) wajib menyampaikan laporan keuangan yang mencakup : (1) laporan realisasi anggaran, (2) neraca keuangan daerah, (3) laporan arus kas, (4) catatan atas laporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan daerah adalah mengatur penyusunan laporan keuangan yang merupakan salah satu kewajiban dari pemerintah kabupaten /kota dalam menyelenggarakan dan mengelola keuangan daerah dalam 1 (satu) periode anggaran (Hariadi, 2010:131).

Pada lampiran Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Tahun 2014 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Pekanbaru untuk tahun 2009-2013 menunjukkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini mengindikasikan bahwa selama 5 (lima) tahun berturut-turut belum terjadi peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

Sumarsono (2010:53) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah.

Persentase penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru pada tahun 2014 masih sangat rendah. Buktinya, hingga awal bulan September 2014 penyerapan APBD masih 30,72%. Meski masih rendah, Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan pada akhir September realisasi penyerapan APBD mencapai 50% dari total anggaran sebesar Rp2,75 Triliun (riauaksi.com). Masih rendahnya penyerapan APBD di Pemerintah Kota Pekanbaru, berarti bahwa pengelolaan keuangan belum terlaksana secara efektif karena Pemerintah Kota Pekanbaru belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kota Pekanbaru tahun 2013 diuraikan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pekanbaru belum menunjukkan hasil yang maksimal. Pada tahun 2013, jumlah anggaran pendapatan daerah adalah Rp2.146.696.993.010,00 dan realisasi pendapatan daerah adalah sebesar Rp1.992.717.417.323,42. Sedangkan sisa anggaran pendapatan sebesar Rp153.979.575.686,58 atau pencapaian realisasi pendapatan daerah sebesar 92,83%. Selanjutnya, jumlah anggaran belanja daerah Kota Pekanbaru tahun 2013 sebesar Rp2.544.530.962.084,00 dan realisasi belanja daerah adalah sebesar Rp1.938.862.046.284,00. Sedangkan sisa anggaran belanja daerah Rp605.668.915.800,00 atau pencapaian realisasi belanja daerah sebesar 75,89% (LAKIP kota Pekanbaru tahun 2013). Dari data ini dapat kita ketahui bahwa persentase

realisasi pendapatan daerah sebesar 92,83% dan realisasi belanja daerah sebesar 75,89%.

Rendahnya penyerapan APBD dan gagalnya target Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka pemerintah daerah dituntut untuk resposif dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah agar bisa berjalan dengan efektif. Untuk dapat mengelola keuangan secara efektif diperlukan sistem pengendalian intern yang memadai. Sistem pengendalian tersebut adalah sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem pengendalian intern pemerintah adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Selain sistem pengendalian internal pemerintah, dalam pencapaian pengelolaan keuangan daerah yang efektif juga diperlukan sumber daya manusia yang kompeten. Pada instansi pemerintahan, agar pengelolaan keuangan berjalan efektif dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasi-onal tentang pemerintahan (Kholis, 2013 dalam Saleba, 2014).

Di samping itu, untuk mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah maka dibutuhkan fungsi pengawasan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efektif yaitu dengan pengawasan fungsional. Menurut Sumarsono (2010:253), pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional, baik

yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah. Pada pemerintah daerah terdapat aparat pengawas fungsional intern pemerintah kabupaten atau kota yang membantu pimpinan pemerintah dalam melakukan pengawasan apakah kegiatan yang dilakukan oleh aparatnya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang telah ditentukan (Laksana, 2014).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Saleba (2014) tentang pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel independen, perluasan sampel, serta lokasi penelitian.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, diantaranya (1) apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah ?, (2) apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah ?, (3) apakah pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah ?.

Adapun tujuan penelitian adalah (1) untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, (2) untuk membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, (3)

untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Sedangkan menurut Halim (2004), pengelolaan/pengurusan umum keuangan daerah berkenaan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah

Efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan di dalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan (Halim, 2004:74). Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah terjadi apabila (1) penyelesaian kegiatan tepat pada waktu yang ditentukan, (2) penyelesaian kegiatan berada dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dan (3) tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Adapun yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah”.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005 dalam Indriasari, 2008). Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes).

Pengawasan Fungsional

Sumarsono (2010), dalam bukunya “Manajemen Keuangan Pemerintah” menyatakan bahwa pengawasan fungsional adalah “pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal

pemerintah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah". Sasaran pelaksanaan pengawasan ini mencakup baik pelaksanaan tugas umum pemerintah maupun pelaksanaan pembangunan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada Pasal 2 (Dua) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dinyatakan bahwa," (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini".

Apabila sistem pengendalian intern pemerintah diterapkan dengan baik, maka seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah akan berjalan secara efektif, dan efisien. Dengan demikian, penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah bisa dipertanggungjawabkan.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah
H₁ : Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam suatu organisasi sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting, karena yang menjalankan serta mengelola suatu organisasi adalah sumber daya manusianya. Untuk itu, diperlukanlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Afrianti (2011), menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan.

Dengan adanya reformasi pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan tenaga yang profesional dibidang pengelolaan keuangan daerah (Darise, 2008:14). Sumber daya manusia adalah hal yang paling utama dalam menjalankan organisasi berfungsi sebagai motor penggerak untuk jalannya roda pemerintahan.

Apabila instansi pemerintahan memiliki aparatur pengelola keuangan yang berkompetensi, maka pengelolaan keuangan akan terlaksana dengan efektif. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia adalah komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah
H₂ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan fungsi pengawasan, karena fungsi pengawasan bertujuan untuk kesesuaian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, serta untuk menjamin keamanan atas kekayaan dan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan efektif adalah dengan pengawasan fungsional.

Halim (2004:312) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pengawasan fungsional mutlak dilaksanakan sehingga keefektifan, keefisien dan keekonomisan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dapat dicapai.

Apabila pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional dengan maksimal, maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan tercapai. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif merupakan tujuan utama pemerintah daerah. Sehingga dengan dilaksanakannya pengawasan fungsional yang memadai akan menunjang pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan ekonomis.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah
 H_3 : Pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekanbaru. Adapun teknik pengambilan sampel

yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti bahwa sampel adalah pihak yang paling baik dijadikan sampel penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala SKPD Selaku Pengguna Anggaran/Barang, Kasubag. Keuangan, Bendahara SKPD dan PPTK-SKPD.

Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa Kepala SKPD, Kasubag. Keuangan, Bendahara SKPD dan PPTK-SKPD merupakan pihak yang terkait langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Responden dalam penelitian ini berjumlah 120 orang dari 32 SKPD yang masing-masing SKPD ada 4 responden.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan cara memberikan kuesioner kepada pegawai yang terkait dengan aparat pengelola keuangan daerah pada masing-masing SKPD kota Pekanbaru.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan koefisien determinasi dengan menggunakan bantuan SPSS versi 20.0.

Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Variabel dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Adapun indikator yang digunakan

dalam penelitian ini adalah Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan, Penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya, Penyelesaian kegiatan dalam batas anggaran yang tersedia, Tercapainya tujuan dan sasaran yang telah direncanakan

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah diukur dengan menggunakan 13 item pernyataan yang mengacu pada Pradita (2010). Indikator pertanyaan tersebut berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Halim (2004).

Variabel Independen

Penelitian menggunakan tiga variabel independen yaitu :

a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern pemerintah diukur dengan menggunakan 15 pernyataan yang mengacu pada Zalni (2013). Pernyataan tersebut berdasarkan unsur-unsur SPIP dalam PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pengendalian internal pemerintah adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan

b. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia diukur dengan menggunakan 10 item pernyataan yang diadopsi dari Indriasari (2008).

c. Pengawasan fungsional

Indikator yang digunakan untuk mengukur pengawasan fungsional adalah berdasarkan tugas pokok inspektorat daerah yang mengacu pada

Permendagri No. 8 Tahun 2009, yaitu Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemeriksaan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh kepala daerah, Pemeriksaan pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, Pemeriksaan terhadap efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, Pemeriksaan keandalan informasi yang dihasilkan pemerintah daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pengembalian Kuesioner

Dalam rangka keperluan penelitian, pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data primer menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekanbaru. Dengan mengambil masing-masing 4 responden pada setiap SKPD yaitu Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, Kasubag.Keuangan SKPD, PPTK-SKPD dan Bendahara SKPD.

Kuesioner dikirim sebanyak 120 kuesioner dan yang kembali sebanyak 109 kuesioner (90,83%). Kuesioner yang tidak lengkap sebanyak 5 kuesioner (4,17%). Sehingga kuesioner yang dapat digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah 104 kuesioner (86,66%).

Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan gambaran tentang ringkasan data dari masing-masing variabel yang akan masuk dalam proses pengujian yang bertujuan untuk mempermudah memahami data. Statistik deskriptif ini

menggambarkan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengawasan Fungsional dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Statistik disajikan dalam tabel *descriptive statistics* yang menunjukkan angka minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	104	54.5481	5.15183
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1)	104	63.1827	5.79381
Kualitas Sumber Daya Manusia (X2)	104	42.9327	3.16309
Pengawasan Fungsional (X3)	104	51.7885	6.17649
Valid N (listwise)	104		

Sumber: data olahan SPSS 20,2015

Nilai rata-rata keempat variabel tersebut lebih besar daripada nilai standar deviasinya, sehingga ini menunjukkan bahwa penyebaran data sudah baik.

Hasil Uji Validitas Data

Pada penelitian ini pengujian validitas menggunakan nilai *Correlated Item – Total Correlation*. Nilai *r* hitung yang diperoleh dalam penelitian ini dibandingkan dengan nilai *r* tabel untuk menguji validitas data. Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Pada penelitian ini diperoleh $df = 104 - 2 = 102$ dengan tingkat signifikan 5%. Nilai *r* tabel dengan derajat bebas (*df*) 102 adalah 0,1927

Dari hasil pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 20.0 ketahu bahwa pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid. Dari tabel tersebut terbukti bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga seluruh item pertanyaan dapat digunakan untuk melakukan pengujian selanjutnya dalam penelitian ini.

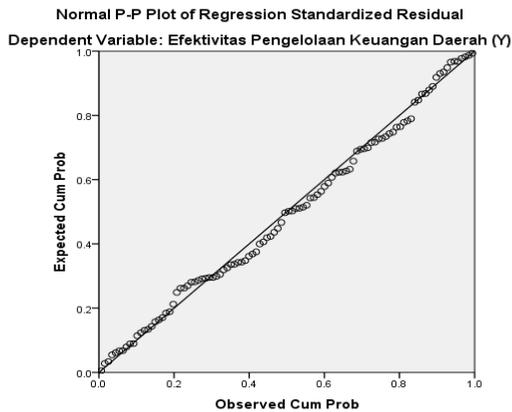
Hasil Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas dilakukan secara statistik sama seperti halnya pengujian validitas data. Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung *Cronbac'h Alpha* dengan bantuan SPSS 20 for windows. Jika nilai hitung *cronbac'h alpha* besar dari 0,60 maka instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel (handal).

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diketahui bahwa keseluruhan instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, hal ini terlihat dari nilai *Cronbac'h Alpha* seluruh variabel yang diteliti lebih besar dari 0,60.

Hasil Uji Normalitas Data

Pada penelitian ini, Uji normalitas data dapat dilihat dari grafik *P-P Plot*. Jika data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal (Ghozali, 2013:161). Hasil pengujian normalitas data dengan *P-P Plot* untuk variabel dependen (Y) efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1 Normal P-P Plot

Regression Standardized Residual

Sumber: data olahan SPSS 20,2015

Dari grafik *P-P Plot* dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinieritas Data

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

**Tabel 2
Nilai Tolerance dan VIF**

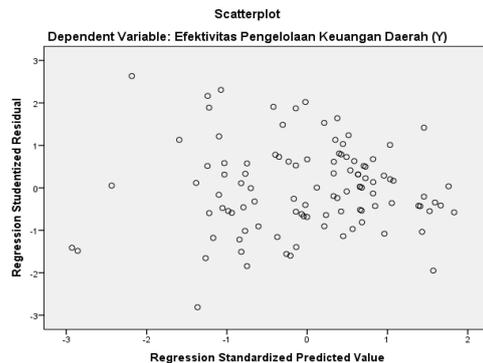
Variabel Independen	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1)	0,661	1,513
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	0,640	1,562
Pengawasan Fungsional (X3)	0,613	1,632

Sumber: data olahan SPSS 20,2015

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa ketiga variabel ini memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *VIF* < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam penelitian ini.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot* antara *SRESID* dan *ZPRED* dimana sumbu Y adalah Y yang diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah *di-studentized*. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 2 berikut:



Gambar 2 Scatterplot

Sumber: data olahan SPSS 20,2015

Dari grafik *scatterplot* di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta penyebarannya terletak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

**Tabel 3
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b**

Variabel independen	Durbin-Watson	Keterangan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) Pengawasan Fungsional (X3)	1,173	Tidak ada autokorelasi

b. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Sumber : data olahan SPSS 20,2015

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* pada variabel independen dan variabel dependen menunjukkan nilai 1,173. Dengan demikian, nilai *Durbin-Watson* berada di antara -2 dan +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada variabel independen.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Pada penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	
(Constant)	6.504	5.343	
1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1)	.335	.079	.377
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	.423	.146	.260
Pengawasan Fungsional (X3)	.168	.076	.202

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Sumber: data olahan SPSS 20,2015

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

$$Y = 6,504 + 0,335X_1 + 0,423X_2 + 0,168X_3 + e$$

Keterangan:

X1: Sistem pengendalian intern pemerintah

X2: Kompetensi sumber daya manusia

X3: Pengawasan fungsional

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2015:97). Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^p

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.696 ^a	.485	.469	3.75300

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Fungsional, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)

b. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Keuangan daerah (Y)

Sumber: data olahan SPSS 20, 2015

Dari tabel 5 diperoleh nilai R sebesar 0,696 atau 69,6%. Sedangkan nilai *R Square* sebesar 0,485 atau 48,5%. Ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Pekanbaru dapat dipengaruhi oleh faktor sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan fungsional sebesar 48,5%. Sedangkan sisanya sebesar 51,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas /independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:98). Uji t dilakukan pada signifikan 5% ($\alpha = 0,05$), maka t tabel dapat diketahui sebagai berikut:

$$t_{\text{tabel}} = n-k-1 ; \alpha/2$$

$$= 104-3-1 ; 0,05/2$$

$t_{tabel} = 1,984$
 $= 100 ; 0,025$
 Hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6
Hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) Coefficients^a

Model	Standardized Coefficients	t	Sig.
	Beta		
(Constant)		1.217	.226
1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1)	.377	4.271	.000
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	.260	2.894	.005
Pengawasan Fungsional (X3)	.202	2.198	.030

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)
 Sumber: data olahan SPSS 20,2015

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Pekanbaru. Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa besarnya t hitung adalah 4,271 sedangkan nilai t tabel adalah 1,984. Kemudian nilai signifiakansiya adalah 0,000 dengan taraf signifikansi 0,05. Sehingga $t_{tabel} > t_{hitung}$ ($4,271 > 1,984$) dan $sig. 0,000 < 0,005$. Dengan demikian variabel sistem pengendalian intern pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya sistem pengendalian

intern pemerintah maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Pekanbaru akan semakin meningkat. Pengelolaan keuangan daerah akan terwujud dengan efektif apabila suatu organisasi pemerintah mampu menciptakan, menerapkan dan memelihara sistem pengendalian intern, sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan suatu instansi, pengamanan asset negara serta meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat pemerintah daerah telah menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah dengan baik maka dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan dapat berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil (manfaat) yang akan dicapai.

Hasil penelitian ini didukung oleh literatur yang berkaitan dengan pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Seperti yang di jelaskan dalam Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa (1) untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel maka menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan pemerintah. (2) Pengendalian atas penyelenggaraan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berpedoman pada SPIP

sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Saleba (2014), Lamusu (2013) dan Zalni (2013) yang membuktikan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Pekanbaru. Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa besarnya t hitung adalah 2,894 sedangkan nilai t tabel adalah 1,984. Kemudian nilai signifiakansiya adalah 0,005 dengan taraf signifikansi 0,05. Sehingga $t_{tabel} > t_{hitung}$ ($2,984 > 1,984$) dan $sig. 0,005 < 0,05$. Dengan demikian variabel kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Pekanbaru.

Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang efektif, maka organisasi pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya. Baik atau buruknya pengelolaan keuangan daerah disebabkan oleh sumber daya manusia yang ada pada pemerinrah tersebut. Hal ini disebabkan karena sumber daya

manusia adalah komponen utama yang berfungsi sebagai motor penggerak dalam menjalankan pemerintahan.

Ketika pemerintah daerah telah memiliki aparat pengelola keuangan yang berkompentensi, maka pengelolaan keuangan daerah akan berjalan dengan efektif. Dengan demikian, semakin berkompentensi aparat pengelolaa keuangan maka pengelolaan keuangan daerah akan berjalan dengan efektif, efisien dan ekonomis. Sebaliknya, jika organisasi pemerintah tidak memiliki sumber daya manusia yang berkompentensi dibidang keuangan, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan efektif.

Hasil penelitian ini membuktikan teori dari Darise (2008:14) bahwa dengan adanya reformasi pengelo-laan keuangan daerah dibutuhkan tenaga yang professional dibidang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena faktor sumber daya manusia adalah hal yang utama dalam menjalankan organisasi yang berfungsi sebagai motor penggerak untuk menjalankan roda pemerintahan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Saleba (2014) yang membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Pekanbaru. Dari tabel 6 dapat

diketahui bahwa besarnya t hitung adalah 2,198 sedangkan nilai t tabel adalah 1,984. Kemudian nilai signifikansi adalah 0,030 dengan taraf signifikansi 0,05. Sehingga $t_{\text{tabel}} > t_{\text{hitung}}$ ($2,198 > 1,984$) dan $\text{sig. } 0,030 < 0,05$. Dengan demikian variabel pengawasan fungsional secara parsial berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Pekanbaru.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan karena sasaran pengawasan fungsional adalah untuk pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan agar berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jadi, dengan adanya pengawasan fungsional dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sehingga pengawasan fungsional oleh inspektorat akan mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan ekonomis. Dengan demikian, semakin baik pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional maka pelaksanaan program kerja pemerintah akan semakin baik, hal ini akan mempengaruhi keefektifitasan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Halim (2004:312) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pengawasan

fungsional mutlak dilaksanakan sehingga keefektifan, keefisienan dan keekonomisan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat tercapai. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif merupakan tujuan utama pemerintah daerah, sehingga dengan dilaksanakannya pengawasan fungsional yang memadai akan menunjang pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan ekonomis.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurhanifah (2014) dan Harto (2012) yang membuktikan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Pekanbaru. Semakin bagus penerapan sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin efektif juga pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kota Pekanbaru.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah kota Pekanbaru. Semakin berkompetensi sumber daya manusia yang bekerja maka pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Pekanbaru akan semakin meningkat.

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Pekanbaru. Semakin baik pengawasan fungsional maka pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Pekanbaru akan semakin efektif.
4. Nilai R Square (R^2) sebesar 0,485 (48,5%), ini menerangkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru diterangkan oleh faktor sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan fungsional sebesar 48,5%.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, yaitu:

Bagi Pemerintahan Kota Pekanbaru, dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan:

- a. Untuk dapat meningkatkan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Kota Pekanbaru agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
 - b. Menempatkan pegawai pada posisi atau lingkup tugas yang sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat lebih memahami dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya.
- Bagi peneliti selanjutnya,
- a. Perlu dilakukan wawancara yang mungkin dapat membantu dalam mengendalikan jawaban tiap responden.

- b. Agar memperluas ruang lingkup penelitian. Misalnya penelitian pada pemerintah provinsi dan dilakuakn pada SKPD yang lebih kompleks. Perlu memasukkan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Misalnya, kinerja pegawai, sistem akuntansi keuangan daerah dan pengawasan melekat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2014. *Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014*. (<http://www.bpk.go.id/>, diakses 06 Oktober 2014).
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: Indeks
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. edisi revisi. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Hariadi, Pramono, Dkk. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Indriasari, Desi & Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern

- Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang Dan Kabupaten OganIlir)”Pontianak : *Simposium Nasional Akuntansi XI*.
- Laksana, Agung Puja. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional Dan Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Public. *Accounting Analysis Journal*.Vol.3,No.2 ISSN 2252-6765.Hlm 177-186.
- Nurhanifah. 2014. Pengaruh Kinerja Pegawai, Pengawasan Melekat Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.*JOM FEKON*.Vol.1,No.2. Universitas Riau
- Pradita,Gilang. 2010. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.*Skripsi*. Universitas Widyatama.
- Saleba,Siti Nurjannah. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada 6 Dinas Di Kabupaten Baubau, Makasar). *Skripsi* Universitas Hasanudin.
- Sumarsono, Sonny.2010.*Manajemen Keuangan Pemerintah*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Zalni, Fitria. 2013. Pengaruh Komitmen Karyawan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.*Jurnal Akuntansi*. Vol.1, No.1.Universitas Negeri Padang.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2013
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,(diakses melalui www.google.com pada 25 September 2014)
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (diakses melalui www.google.com pada 29 September 2014)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (diakses melalui www.google.com pada 18 September 2014)
- Realisasi penyerapan APBD 2014 Kota Pekanbaru masih rendah. (diakses melalui www.riauaksi.com